

RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022



**KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**



DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Mr. Syarifuddin Prawira Negara KM 07 Tanjung Pati

Telp.(0752) 7754203 Fax (0752)7750136

E-mail : dishub50kota@gmail.com

Website : <http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/>



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA



ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dan juga dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam bentuk hasil kesepakatan-kesepakatan Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran.

Renja selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sehingga pada akhirnya diharapkan dapat tercapai proses perencanaan pembangunan transportasi yang baik.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat dihargai sebagai pembelajaran (*learning proses*) untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan semoga yang telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tanjung Pati, 4 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2016-2021	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	69
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	69
3.3 Program dan Kegiatan	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	78
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	78
BAB V PENUTUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	14
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	32
Tabel II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	38
Tabel II.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	64
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	70
Tabel III.2	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	72
Tabel III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023	73
Tabel IV.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	79
Tabel IV.2	Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan OPD	97
Tabel IV.3	Rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan. Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan dokumen Renja yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja OPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena mencakup perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih tinggi seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga kualitas penyusunan Renja akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat penggunaanya.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang penyusunannya melibatkan aparatur Dinas Perhubungan guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Renja OPD adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh OPD yang berpedoman kepada RKPD. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja OPD adalah seluruhnya dipedomani dari RKPD, agar target kinerja Daerah tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di OPD.

Selanjutnya Renja Tahun 2023 nantinya sebagai tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4700);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perhubungan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perhubungan.
3. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perhubungan.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja), Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2023

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 terhadap capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2022 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Persentase penggunaan anggaran tahun 2021, dari pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.836.308.098 direalisasikan sebesar Rp. 15.446.281.132 atau 97,54%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 390.026.966 atau 2,46%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 maka pencapaian realisasi Renstra sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2021 terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan target awal perencanaan. Hal ini masih disebabkan terjadinya bencana

nasional wabah Covid-19. Anggaran mengalami Refocussing untuk penanganan Covid-19. Sehingga Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan beberapa Kegiatan. Terutama sub kegiatan yang mengumpulkan massa/masyarakat karena adanya arahan dari Pemerintah Pusat untuk pembatasan berkumpulnya massa/masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, anggaran dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

A. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

C. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- ✓ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

D. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- ✓ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

E. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- ✓ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- ✓ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

F. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

G. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2021, kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- F. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- G. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - ✓ Pembangunan Gedung Terminal
- H. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- I. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota

- ✓ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- J. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- K. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Fasilitasi Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Pada tahun 2021 tidak terdapat program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik terealisasi pada masing-masing kegiatan.
- Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak dapat mencapai target kinerja. Berbagai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
- a. Tidak cukup/kurang tersedianya anggaran untuk penunjang pelaksanaan 2 Program, 14 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan pada tahun 2021, dikarenakan adanya kebijakan *refocussing* anggaran terkait bencana Nasional Covid-19.

Sehingga yang terlaksana adalah 2 Program, 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak terlaksana diantaranya :

- A. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - B. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - C. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - ✓ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - D. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - E. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - ✓ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - ✓ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - F. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - G. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, selain kurang tersedianya anggaran, kondisi pada tahun 2021 tidak memungkinkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Sehingga beberapa kegiatan yang berhubungan dengan khalayak ramai atau mengumpulkan massa/masyarakat seperti sosialisasi maupun pemilihan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya karena adanya arahan dari Pemerintah Pusat untuk pembatasan berkumpulnya massa/masyarakat untuk mencegah Covid-19.
- c. Kurangnya pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan rencana

dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.

d. Kurangnya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal Perangkat Daerah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan masyarakat pada umumnya
- b) Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak pada laporan target kinerja dan laporan realisasi keuangan perangkat daerah,
- c) Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- d) Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a) Untuk keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan pengusulan anggaran ke pemerintah agar mendapatkan dana tambahan ke daftar anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota,
- b) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai,
- c) Kerjasama yang baik dari berbagai pihak internal maupun eksternal Perangkat Daerah sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai target dan sasaran sehingga meminimalisir ketidaksesuaian antara berbagai pihak,

- d) Dilakukan peningkatan kinerja agar tercapainya target kegiatan pada tahun yang akan datang.
- e) Dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan melakukan pelatihan/diklat/pendidikan agar terampil dalam melaksanakan tugas demi lancarnya program yang telah direncanakan,

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2022, maka Rekapitulasi Evauasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan 2022 disajikan pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%		85%	85%	100%	85%	85%	100%
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKJiP, SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan)	30	24	5	5	100%	5	34	113%
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja triwulan	22	0	2	2	100%	4	6	27%
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	242	0	1	1	100%	46	47	19%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	72		12	12	100%	12	24	33%
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perhubungan	6	5	1	1	100%	1	7	117%
2	15	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	80		0	0		16	16	20%
2	15	1	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan hasil analisis pronogsis realisasi anggaran yang disusun	5		0	0		1	1	20%
2	15	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%		0%	0%		100%	100%	100%
2	15	1	2	03	01	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	5		0	0		1	1	20%
2	15	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	5		0	0		1	1	20%
2	15	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	10		0	0		2	2	20%
2	15	1	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	10		0	0		2	2	20%
2	15	01	2	04		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%		0%	0%		100%	100%	100%
2	15	1	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah	20		0	0		4	4	20%
2	15	1	2	04	02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	20		0	0		4	4	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Daerah									
2	15	1	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen daftar/data objek retribusi daerah yang tersedia	20		0	0		4	4	20%
2	15	1	2	04	05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	60		0	0		12	12	20%
2	15	1	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	60		0	0		12	12	20%
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		100%	0%	0%	100%	100%	100%
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya							0	
							PDH (Stel)	310	90	0	0		95	185	60%
							PDL (Stel)	378	73	0	0		126	199	53%
							Kelengkapan Pakaian Dinas Lainnya (Set)	688	25	0	0		221	246	36%
2	15	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang difasilitasi pemulangannya	25		0	0		5	5	20%
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	72	60	2	0	0%	14	74	103%
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	36	60	12	12	100%	6	78	217%
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17	60	12	12	100%	17	89	524%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	160	60	12	12	100%	41	113	71%
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	482.914	60	12	12	100%	80150	80.222	17%
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	6379	60	12	12	100%	1042	1.114	17%
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	3174		12	12	100%	500	512	16%
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	144	60	12	12	100%	24	96	67%
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%		0%	0%		100%	100%	100%
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	11	1	0	0		5	6	55%
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel		32	0	0		54	86	
							Kursi Kerja (Unit)	50	39	0	0		10	49	98%
							Kursi Rapat (Unit)	13	19	0	0		13	32	246%
							Kursi Kerja Kabid (Unit)	3	0	0	0		3	3	100%
							Kursi Tamu (Set)	3	0	0	0		2	2	67%
							Kursi Tunggu (Set)	5	5	0	0		1	6	120%
							Lemari Set (Unit)	15		0	0		3	3	20%
							Meja Sekat Kantor (Set)	50	11	0	0		10	21	42%
							Meja Kerja 1/2 Biro (Unit)	11	1	0	0		11	12	109%
							Meja biro (Unit)	0	1	0	0			1	
							Meja Rapat (Paket)	1		0	0		1	1	100%
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru							0	
							Infokus (unit)	2		0	0		1	1	50%

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Komputer (unit)	14	18	0	0				18	129%
							Laptop (Unit)	13	9	0	0		3		12	92%
							UPS (Unit)	14	5	0	0				5	36%
							Hardisk (Unit)	2	1	0	0				1	50%
							Printer (Unit)	17	21	0	0		5		26	153%
							Speaker (Unit)	4	1	0	0		1		2	50%
							CCTV (unit)	6		0	0		2		2	33%
							HT (Unit)	35	6	0	0		7		13	37%
							Kamera (Unit)	2		0	0		1		1	50%
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	2.917	60	12	12	100%	500		572	20%
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	23.379.032	60	12	12	100%	3300000		3.300.072	14%
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	18	60	12	12	100%	3		75	417%
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	108	60	12	12	100%	18		90	83%
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berondisi baik	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	66	60	12	12	100%	11		83	126%
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	5	4	1	0	0%	1		5	100%
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah sarana dan prasarana	7		0	0		1		1	14%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor yang diperlihara/direhab							
2	15	02				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2,42	3,13	3,13	100%	2,97	2,97	123%
2	15	02				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	0,53	0,53	100%	0,53	0,53	106%
2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penyusunan Jaringan Jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak	2	0	0		1	1	50%
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	1	1	1	100%	0,6	1	160%
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kaupaten/kota yang dibangun					0	0	
							Jumlah Pengadaan Trotoar Jalan (KM)						0	
							Jumlah hatlts/shalter yang terbangun dan berfungsi dengan baik (Unit)						0	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan						0	
							Jumlah wilayah kecamatan yang dilakukan survey kebutuhan alat perlengkapan jalan (kecamatan)	31	5	5		13	23	74%
							Jumlah marka yang terpasang yang berfungsi dengan baik (M2)	89.890	1.700			22390	24.090	27%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah pagar pengaman jalan (quadriil) terpasang yang berfungsi dengan baik (Unit)	1.242	200				442	642	52%
		Jumlah PJU yang terpasang yang berfungsi dengan baik (Unit)	6.313	870	26	26	100%	2737	3.633	58%
		Jumlah Traffic Light yang terpasang yang berfungsi dengan baik (unit)	15					11	11	73%
		Jumlah Warning Light yang terpasang yang berfungsi dengan baik (unit)	104	4				72	76	73%
		Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang terpasang yang berfungsi dengan baik (unit)	80	20				0	20	25%
		Jumlah rambu-rambu lalu lintas dan rambu portable yang terpasang yang berfungsi dengan baik(unit)	3.283	449				883	1.332	41%
		Jumlah Papan Nama Jalan yang terpasang yang berfungsi dengan baik (unit)	20						0	0%
		Jumlah cermin tikung yang terpasang yang berfungsi dengan baik (Unit)						14	14	
		Jumlah data kebutuhan perlengkapan jalan di pengalihan jalan nasioanal (data)	1						0	0%
		Jumlah road barrier yang terpasang yang berfungsi dengan baik (unit)	250					50	50	20%
2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah praasarana jalan yang dipelihara		0	
							Jumlah Trotoar Jalan yang berfungsi dengan baik (KM)	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Jumlah halte/shalter yang berfungsi baik (Unit)	5					1	1	20%
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							0	
						Jumlah marka yang berfungsi dengan baik (M2)							0	
						Jumlah pagar pengaman jalan (guadrill) yang berfungsi dengan baik (Unit)							0	
						Jumlah PJU yang berfungsi dengan baik (unit)	2818	2215	0	0		500	2.715	96%
						Jumlah Traffic Light yang berfungsi dengan baik (unit)							0	
						Jumlah Warning Light yang berfungsi dengan baik (unit)	40	15				8	23	58%
						Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang terpasang yang berfungsi dengan baik(unit)							0	
						Jumlah rambu-rambu lalu lintas dan rambu portable yang berfungsi dengan baik (unit)	536		86	86	100%	100	186	35%
						Jumlah Papan Nama Jalan yang berfungsi dengan baik (unit)							0	
						Jumlah cermin tikung yang berfungsi dengan baik (Unit)							0	
						Jumlah Materisasi PJU (Paket)		2					2	
						Jumlah pengadaan kendaraan khusus pemeliharaan PJU (Skylift) guna peningkatan fasilitas keselamatan jalan (unit)	2					1	1	50%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen Analisa Rencana DED Terminal ya (Dokumen)	1					1	1	100%
2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun		1	1	1	100%	5	7	
							Jumlah retribusi yang terkumpul (Rp)		1.617.591.780	790.309.000		0%	790.309.000	2.407.900.780	
							Jumlah Lahan (Hektar)	4					4	4	100%
							Jumlah Mushola (unit)						1	1	
							Jumlah Kios (unit)	12						0	0%
							Jumlah Aspal Beton (m2)	3.500						0	0%
							Jumlah PJU (unit)	30						0	0%
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang tersedia dalam keadaan baik (unit)	30		1	0	0%	11	11	37%
							Jumlah Rabat Beton sedimen (m2)	0						0	
							Jumlah Bangunan Kios Yang diBangun (unit)	21					11	11	52%
							Jumlah Rabat Beton parkir (m2)	2.500						0	0%
							Jumlah Halte (unit)	7						0	0%
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%		0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							0	#DIV/0!

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Survey lokasi Pembangunan Parkir yang harus di beri izin (kali)	50					10	10	20%
							Jumlah Rekomedasi pengurusan izin penyelenggaraan parkir (dokumen)	50					10	10	20%
							Jumlah Data Lokasi Parkir (dokumen)	60					12	12	20%
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Pelakasanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten (kali)	25					5	5	20%
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%		93%	93%	100%	93%	93%	98%
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (unit)	2	8	1	1	100%	1	10	500%
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (orang)	36		6	0	0%	6	6	17%
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji berkala yang teregistrasi (unit)	150	12	0	0		70	82	55%
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Set)						10367	10.367	
							Bukti Lulus Uji Elektronik (Smart Card) (Set)	51.657	7.500	4.000	4.000	100%	8500	20.000	39%
							Kartu Induk (Buah)	12.500					1500	1.500	12%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Blanko SKRD (Buku)	1.275	900	150	150	100%	175	1.225	96%
							Kertas NCR (Buku)	1.150					150	150	13%
							Baju (Stel)	35	11				7	18	51%
							Sepatu (Pasang)	35	11				7	18	51%
							Sarung Tangan (Pasang)	35	11				7	18	51%
							Helm (Buah)	35	11				7	18	51%
							Masker (Buah)	35	11				7	18	51%
							Senter Kepala (Buah)	35					7	7	20%
2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.300					340	340	15%
2	15	02	2	05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah laporan analisis potensi kendaraan bermotor wajib uji (Laporan)	1					1	1	100%
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian yang tersedia dipelihara dalam keadaan baik dan standar (unit)	119						0	0%
							Kalibrasi (unit)	45					9	9	20%
							Akreditasi (unit)	5					1	1	20%
							Alat Uji PKB (Unit)	54	9	9	9	100%	9	27	50%
							Alat Pendukung (Unit)	15					3	3	20%
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								0	
							Jumlah pelajar yang terpilih	60	30	0	0		60	90	150%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						sebagai pelajar pelopor kabupaten lima Puluh Kota (Orang)								
						Jumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas dan titik kemacetan yang teratasi (Titik)	68	40	60	60	100%	62	162	238%
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.321	386	100	100	100%	180	666	50%
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	61	9	1	1	100%	8	18	30%
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%					100%	100%	100%
2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	33					5	5	15%
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	58					10	10	17%
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	58					10	10	17%
2	15	02	2	08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100%		0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	10		0	0		2	2	20%
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	58					10	10	17%
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	38					6	6	16%
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	170	179	0	0		22	201	118%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Razia angkutan umum yang terlaksana (Kali)	70	28	0	0		12	40	57%
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%		0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	09	01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Pertemuan dengan Perusahaan Angkutan Barang dan Orang	75					15	15	20%
2	15	02	2	10		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%		0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah data penumpang angkutan perintis-suliki, jumlah data rancangan trayek angkutan perintis dan jumlah data penumpang atau pasien rujukan ke RS. Achmad Darwis Suliki (Laporan)	15					3	3	20%
2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah sopir/juru mudi angkutan umum yang mengikuti penyuluhan (orang)	230	75	0	0		33	108	47%
2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	12	01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan survei harian rata-rata (jalur)	25		4	4	100%	7	11	44%
2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan	Jumlah masyarakat dan siswa Pelajar Tingkat SLTP/SLTA	7.200	2.200	0	0		1000	3.200	44%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1	2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota								
2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik							0	
						Kartu Kontrol Izin Usaha(Lembar)	16.932	4.432	2.500	2.500	100%	2500	9.432	56%
						Dokumen Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan (Dokumen)	25					5	5	20%
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Mutasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Dokumen)	25					5	5	20%
						Jumlah Dokumen pemberian Izin Insidentil	32	7	7	7	100%	5	19	59%
						Jumlah izin trayek angkutan pedesaan yang diterbitkan (buah)	25					5	5	20%
2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota							0	
						Jumlah data Perusahaan Angkutan Perkotaan	57	8	4	4	100%	5	17	30%
						Jumlah Data Persahaan Angkutan Perdesaan	31		11	11	100%	4	15	48%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1		0	0		100%	100%	100%
2	15	02	2	16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota Kabupaten/Kota	Jumlah tarif kelas ekonomi berdasarkan trayek 2 (dua) jenis tarif	2		0	0		2	2	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Untuk kinerja pelayanan di bidang penyelenggaraan transportasi, pemerintah daerah belum mempunyai legalitas yang mendukung atau belum diaturnya petunjuk pelaksana atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang urusan Perhubungan. Belum adanya standar tentang layanan transportasi yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, maka dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas, dengan target 0,53 dan tidak terealisasi/ tidak tercapainya target dikarenakan adanya refocusing dan pemotongan anggaran untuk pelaksanaan survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Tahun 2021.
2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan, dengan target 3,13 dan realisasi capaian 5,17, tidak tercapainya target dikarenakan meningkatnya jumlah kecelakaan dan jumlah fatalitas (Meninggal Dunia).
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan, dengan target 79,56 dan realisasi capaian adalah 69,75 dengan kategori peringkat B (Baik).
4. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan, dengan target 1% dan realisasi capaian 0,96%, tidak tercapainya target hal ini dikarenakan adanya peningkatan kejadian kecelakaan pada tahun 2021.
5. Persentase sarana keselamatan lalu lintas di jalan yang berfungsi dengan baik, dengan target 60% dan realisasi capaian 55%, tidak tercapainya target hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan sarana keselamatan lalu lintas jalan dan kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana keselamatan jalan.

6. Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan, dengan target 93 dan realisasi capaian 98, tercapainya target hal ini dikarenakan adanya pengadaan speedometer uji tester pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Aspek penyebab kemacetan yang teratasi, dengan target 60 titik kemacetan dan terealisasi 46 titik kemacetan yang meliputi pasar, sekolah, persimpangan. tidak tercapainya target hal ini dikarenakan berkurangnya titik kemacetan sekolah dikarenakan wabah Covid-19 yang mengharuskan sekolah tidak tatap muka, sehingga tidak ada kegiatan yang menimbulkan kemacetan pada sekolah-sekolah.
8. Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan, dengan target 97,75 dan realisasi capaian 97,54. Realisasi keuangan Dinas Perhubungan tidak mengalami kendala yang berarti.
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target 85 dan realisasi capaian 79. Tidak tercapainya target hal ini dikarenakan survey kepuasan masyarakat hanya dilaksanakan pada satu pelayanan masyarakat yaitu pengujian kendaraan bermotor.
10. Jumlah arus penumpang angkutan umum, dengan target 4.100.000 orang dan realisasi capaian 3.684.552 orang. Tidak tercapainya target hal ini dikarenakan kurangnya perjalanan angkutan umum sehingganya berkurangnya penumpang disebabkan wabah Covid-19.
11. Rasio ijin trayek, dengan target 2.93 dan realisasi capaian 3.86. Tercapainya target hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
12. Jumlah uji KIR angkutan umum, dengan target 5.920 unit dan realisasi capaian 6.899 unit. Tercapainya target dikarenakan adanya pengadaan *speedometer uji tester* pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
13. Jumlah Pelabuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang, dengan target 3 Terminal dan terealisasi 3 Terminal diantaranya Terminal Barang Rimbo Data Pangkalan, Terminal Penumpang Tipe C Pangkalan, Terminal Penumpang Tipe C Limbanang.
14. Persentase layanan angkutan darat dengan target 1.95% dengan realisasi capaian 0.012%. Tidak tercapainya target, hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah angkutan darat.

15. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum, dengan target 87% dan realisasi capaian 92%.
16. Pemasangan Rambu-rambu, dengan target 60% dan realisasi capaian 100 %. Tercapainya target pemasangan rambu sejumlah 50 Unit dan terealisasi 50 Unit.
17. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dengan target 0,0155 dan realisasi capaian 0,0274.
18. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, dengan target 4.100.000 orang dan realisasi capaian 3.684.552 orang. Tidak tercapainya target hal ini dikarenakan kurangnya perjalanan angkutan umum sehingga berkurangnya penumpang disebabkan wabah Covid-19.
19. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun, dengan target 125.000 orang dan realisasi capaian 355.988 orang, telah mencapai target.
20. Rasio Konektivitas Kota, dengan target 45 dan realisasi capaian 15.
21. V/C Ratio di jalan Kota, dengan target 0,53 dan tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing dan pemotongan anggaran untuk pelaksanaan survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Tahun 2021.

Selanjutnya kajian terhadap capaian kinerja pelayanan disajikan dalam bentuk tabel dalam Tabel II. 2

Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	15	16	17
1	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	-	0,53	0,53	0,52	0,51	N/A	0,53	0,52	0,51	
2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	-	-	3,13	2,97	2,82	2,68	2,55	2,97	2,82	2,68	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	-	-	79,56	79,57	79,58	79,59	69,75	79,57	79,58	79,59	
4	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	-	-	1%	1%	2%	3%	-0,96%	1%	2%	3%	
5	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	-	-	60%	62%	65%	70%	55%	62%	65%	70%	
6	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	-	-	93	93	94	94,5	98	93	94	94,5	
7	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi	-	-	60	60	62	64	46	60	62	64	
8	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	-	-	97,75	97,75	97,8	98,00	97,54	97,75	97,8	98,00	
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	85	85	86	79	85	85	86	
10	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	-	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	3.684.552	4.200.000	4.300.000	4.400.000	
11	Rasio ijin trayek	-	-	2,93	2,94	2,95	2,96	3,86	2,94	2,95	2,96	
12	Jumlah uji KIR angkutan umum	-	-	5920	5976	6069	6162	6899	5976	6069	6162	
13	Jumlah Pelabuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang	-	-	3	4	4	4	3	4	4	4	

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	15	16	17
14	Persentase layanan angkutan darat	-	-	1,95%	1,98%	2,00%	2,20%	0,012%	1,98%	2,00%	2,20%	
15	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	87%	89%	91%	93%	92%	89,00%	91%	93%	
16	Pemasangan Rambu-rambu	-	-	60%	60%	61%	62%	100%	60%	61%	62%	
17	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0274	0,0155	0,0155	0,0155	
18	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	-	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	3.684.552	4.200.000	4.300.000	4.400.000	
19	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-	125.000	130.000	135.000	140.000	355.988	130.000	135.000	140.000	
20	Rasio Konektivitas Kota	-	-	45	46	47	48	15	46	47	48	
21	V/C Ratio di jalan Kota	-	-	0,53	0,53	0,52	0,51	N/A	0,53	0,52	0,51	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai mana yang menjadi tujuannya yaitu Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Untuk pencapaian ini telah dilaksanakan kegiatan strategis untuk menindaklanjuti hal yang kritis dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan, kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut :

- a. Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan, diantaranya persimpangan, pasar-pasar dan sekolah pada saat jam sibuk.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas, diantaranya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pengadaan rambu, Pengadaan Marka dan lainnya
- c. Sosialisasi tata cara berlalu lintas bagi pengguna jalan, untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sehingga terwujudnya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan wewenang di Bidang Perhubungan dengan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan dan perumusan program dan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam Kabupaten Lima Puluh Kota di Bidang Perhubungan;
- d. Pembinaan Teknis di Bidang Perhubungan;
- e. Pengawasan dan Pengendalian di Perhubungan;
- f. Penelitian di Bidang Perhubungan;
- g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan *search and rescue* di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

1. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan
2. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat/pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas

3. Keterbatasan ruang parkir sehingga kendaraan menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan
4. Belum adanya kebijakan pemerintah dalam mengalihkan penetapan status jalan Nasional sehingga menyebabkan Kawasan Perkotaan (IKK) Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum tertata dan terkelola dengan baik
5. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ maupun perlengkapan jalan.
6. Belum memadainya angkutan umum yang melayani daerah-daerah terisolir pada wilayah Kabupaten.
7. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas
8. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan;
9. Tidak meratanya beban kerja;
10. Lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian;
11. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi;

Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu pada misi 5 yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong perumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”, dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan transportasi yang belum optimal, terpadu dan terintegrasi
2. Pelaksanaan sistem dan mekanisme transportasi yang belum efektif dan efisien

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan memperlihatkan tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan
 - a. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
 - b. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas;
 - c. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal
2. Peluang
 - a. Letak geografis yang strategis;
 - b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah;
 - c. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

- d. Adanya potensi hubungan mutualisme dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan *Stake holder* lainnya.

Dalam menyikapi isu-isu penting, rekomendasi dan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Mengoptimalkan penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah
3. Membangun sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Melakukan pendataan dan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas dan parkir
6. Memiliki data yang *valid* dan *up to date*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Disebabkan karena Rancangan Awal RKPD kadang tidak sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan OPD, dimana analisis kebutuhan membutuhkan anggaran yang lebih besar dari pagu RKPD.

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Adanya perubahan indikator pada setiap sub kegiatan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, adanya perubahan indikator sub kegiatan sehingga berubahnya target capaian kinerja pada setiap sub kegiatan.

3. Adanya tiga sub kegiatan yang belum di akomodir dalam rancangan awal RKPD, yaitu :
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - ✓ Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
4. Pagu Indikatif pada Rancangan Awal RKPD tidak sesuai dengan Kebutuhan Dana pada Hasil Analisa Kebutuhan. Kebutuhan Dana Hasil Analisa Kebutuhan merupakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang direncanakan sesuai dengan Pagu Infikaif Tahun 2023.

Berikut adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang ditampilkan dalam Tabel II. 3

Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				35.210.915.527	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				21.809.451.336	
2	15	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				15.222.083.539	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14.147.795.736	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	298.704.908	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	133.962.900	
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	60.499.908	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	62.896.000	
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	38.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	31.680.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	64.900.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	22.000.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 Laporan	50.325.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.324.900	
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	30.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.742.000	
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	4.581.880.071	Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	3.791.024.367	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	46 orang/bulan	4.415.116.771	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	3.775.329.367	
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	103.252.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.578.000	
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	22.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.117.000	
2	15	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	20.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	12 Laporan	0	
2	15	1	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	20.610.700	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1 Dokumen	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
													Anggaran			
2	15	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	198.330.000	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	0	
2	15	1	2	03	01	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Baarang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	38.808.000	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	
2	15	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	48.950.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	
2	15	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	32.670.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	
2	15	1	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	77.902.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	04		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	89.718.900	Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	0	
2	15	1	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	21.017.700	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	
2	15	1	2	04	02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	1.718.500	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	
2	15	1	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	851.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	
2	15	1	2	04	05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	12 Dokumen	1.125.400	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	1	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	65.005.700	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	0	
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	642.450.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	480.000.000	
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	200 Paket	0	
2	15	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiuan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	5 Orang	2.450.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiuan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	0	
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14 Orang	640.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	480.000.000	
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	451.018.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	'100%	556.358.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	3.740.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis 1 Paket	10.730.000	
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	11.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket 17 Jenis	25.079.000	
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paaket	100.534.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Jenis 4 Paket	100.952.700	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	69.741.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah barang cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	80200 Lemb 12 Paket 6 Jenis	70.376.800	
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	6.686.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1100 Eksemp 12 Dokumen	6.850.000	
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	90.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang dilayani	12 Laporan 600 Porsi	50.372.500	
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24 Laporan	168.567.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	291.997.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	342.785.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	'100%	480.800.000	
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300.450.000	
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	24 Unit	149.535.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	40.400.000	
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24 Unit	193.250.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	139.950.000	
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.658.646.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'100%	7.746.849.000	
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang disediakan	1 Laporan 500 Lembar	10.000.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah LAPORAN Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	7.260.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	12 Laporan 3630000 KW	7.260.000.000	
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	12 Laporan	20.290.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Laporan 3 Jenis	17.550.000	
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Umum yang di sediakan (Laporan)	12 Laporan	372.856.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	12 Laporan 18 Orang	459.299.000	
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	958.550.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	'100%	958.801.469	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan terbayarnya pajak dan Perizinannya (Unit)	15 Kendaraan	223.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	437.373.000	
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	535.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	264.543.000	
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	256.885.469	
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				19.988.831.988					7.661.655.600	
2	15	02	02	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	499.600.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	'100%	391.568.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	499.600.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202.043.000	
2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	91.875.000	
2	15	02	2	01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	97.650.000	
2	15	02	02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	65%	8.889.125.468	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	65%	1.986.519.500	
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0%		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	500 Unit	7.620.530.468	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	459.701.700	
2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1 Unit	39.950.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	93.001.000	
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	500 Unit	1.228.645.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit	1.433.816.800	
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%	4.050.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%	409.175.000	
2	15	02	2	03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	2.750.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	0	
2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun (Unit)	1 Unit	450.000.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	03	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan Pengembangan (Unit)			Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan (unit)	1 Unit 0 Unit	0	
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2 Unit	750.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	298.550.000	
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	110.625.000	
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	84.540.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	349.955.500	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	10 Dokumen	43.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	238.250.000	
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5 Laporan	41.040.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	111.705.500	
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	94%	868.271.020	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	94%	580.009.500	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	0	
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	6 Orang	243.396.500	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	142.366.000	
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar (Unit)	80 Unit	39.500.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	80 Unit	39.493.000	
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	6000 Dokumen	265.165.320	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000 Dokum	113.060.000	
2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1 Laporan	159.851.600	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	159.844.600	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9 Unit	51.093.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	41.017.500	
2	15	02	2	05	08	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3 Laporan	47.449.000	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	44.355.900	
2	15	02	2	05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1 Laporan	21.920.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	0	
2	15	02	2	05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1 Laporan	39.895.600	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	39.872.500	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	4.406.452.500	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	3.072.924.000	
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	1 Laporan	3.900.282.500	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.828.956.000	
2	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 Unit	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	12 Laporan	241.822.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	185.916.000	
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Farum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	2 Laporan	264.348.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	58.052.000	
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	251.759.200	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	232.895.500	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	6 Orang	51.138.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	52.782.000	
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	12 Laporan	104.436.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	94.579.500	
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	12 Laporan	96.184.600	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	85.534.000	
2	15	02	2	08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	531.213.800	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	366.375.000	
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2 Orang	82.572.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	67.846.000	
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4 Laporan	120.670.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	4 Laporan	165.135.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	0	
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	74.996.800	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	81.309.000	
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12 Laporan	87.840.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	217.220.000	
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	29.099.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	09	01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (Unit)	1 Unit	30.000.000	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	29.099.000	
2	15	02	2	10		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	80.091.800	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	0	91.886.200	
2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	1 Dokumen	38.712.000	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.418.700	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	41.379.800	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	56.467.500	
2	15	02	2	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	58.808.200	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	131.728.400	
2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	1 Dokumen	58.808.200	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	131.728.400	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	65.150.000	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	0	0	
2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan dan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	65.150.000	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	173.820.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	19.520.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi secara Elektronik (Laporan)	1 Laporan	150.340.000	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	0	
2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota (Laporan)	1 Laporan	23.480.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.520.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran pimpinan daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang.

Satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Perhubungan harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, tidak hanya memenuhi keinginan dan kepentingan satu kelompok lalu mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perhubungan dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Usulan program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Perhubungan untuk Tahun 2023 berjumlah 68 usulan, terdiri dari 37 Usulan Pokok Pikiran Dewan (Pokir) dan 31 Usulan Aspirasi Masyarakat (Musrenbang). Seluruh Usulan merupakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan merupakan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan perlengkapan Jalan diantaranya : Penerangan Jalan Umum (PJU Solar Cell), Cermin Tikung, Rambu-Rambu (Portable), RPPJ dan Pita Penggaduh (Marka Kejut).

Berikut disajikan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
POKOK PIKIRAN					
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
1.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Kapur IX, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		pemasangan dikecamatan mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Mungka	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	PJU
		Nag. Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	PJU
		kecamatan luak, Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Luak, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	PJU
		Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Lareh Sago Halaban, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	PJU
		Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Lareh Sago Halaban, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	RPPJ
		kecamatan luak, Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Luak, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	RPPJ
		kecamatan lareh sago halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Lareh Sago Halaban, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	Rambu-Rambu (Portable)
		kecamatan luak, Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Luak, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	Rambu-Rambu (Portable)
		taeh bukik, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Taeh Bukik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	Rambu-Rambu (Portable)
		taeh bukik, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Taeh Bukik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	Cermin Tikung
		taeh bukik, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Taeh Bukik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	PJU
		Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Jrg Kubang Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota, Guguk, Kubang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Tersedia		
		Jrg Koto Baru Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Kubang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Kubang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Kubang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Jrg Tiakar Nagari Guguak VIII Koto, Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Guguak VIII Koto	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Kecamatan Mungka, Kecamatan Guguak, dan Kecamatan Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Mungka, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	PJU
		Tanjung haro Padang panjang, Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Bukik Sikumpa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Sei Rimbang, Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Sungai Rimbang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	PJU
		Jorong Rageh Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Bukik Sikumpa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	PJU
		Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Batu Payuang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	PJU
		Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Tanjuang Gadang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	PJU
		Jorong Air Babar Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Halaban	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	PJU
		Kec. Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Bukik Barisan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	Pita Penggaduh (Marka Kejut)
		Kecamatan Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Bukik Barisan, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	PJU
		sekecamatan harau dan kecamatan payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	PJU
		Nag. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Mungka	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	PJU
		kecamatan kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Kapur IX, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Unit	PJU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		kecamatan pangkalan koto baru, Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Pangkalan Koto Baru, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Unit	PJU
		Kecamatan Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Gunung Omeh, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	PJU
		Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Lubuak Alai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	PJU
		Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Lareh Sago Halaban, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	PJU
		koto tengah batu hampa, Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Koto Tengah Batu Ampa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Cermin Tikung
		nagari durian gadang, Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	PJU
Aspirasi Masyarakat					
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
2.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jorong Balai, Jorong Janjang Tinggi dan Jorong Koto Nan Gadang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Pilubang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	PJU
		Jorong Situjuh Gadang, Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Situjuh Gadang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	Rambu-Rambu (Portable)
		nagari sungai beringin, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sungai Beringin	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Unit	PJU
		tanjuang bungo, Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Tanjuang Bungo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	PJU
		tanjuang bungo, Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Tanjuang Bungo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	Rambu-Rambu (Portable)
		Nagari Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Nagari Sialang, Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sialang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Nagari Mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Mungka	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Tersedia		
		Batuhampar, Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Batuhampar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Nagari Lubuak Batingkok, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Lubuak Batingkok	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Nagari Mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Mungka	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	Cermin Tikung
		Seluruh Persimpangan jalan di Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, VII Koto Talago	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	PJU
		Jorong Koto Tuo, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Mungka	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Rambu-Rambu (Portable)
		Sungai Balantiak, Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Sungai Balantiak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Nagari Manggilang, Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Manggilang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	Rambu-Rambu (Portable)
		Jorong Koto Baru, Jorong Parumpung,, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	PJU
		Simpang Sugiran, Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Simpang Sugiran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	PJU
		Jorong Bukik Bulek, Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Banja Loweh	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Cermin Tikung
		Jorong Pincuran Tujuh, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Sungai Antuan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Cermin Tikung
		Jorong Panang ke Jorong Koto Lamo, Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Tanjuang Balik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Nagari Sungai Antuan, Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Sungai Antuan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	PJU
		Nagari Lubuak Alai, Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Lubuak Alai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Unit	PJU
		jorong bukit tapung, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Taeh Bukik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		VI Kampung (0.24976068290136352.100.673464360 66363), Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Sungai Kamuyang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Bukik Sikumpa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	PJU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Jorong Tareh, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Balai Panjang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	38 Unit	PJU
		Koto bangun, Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Koto Bangun	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	PJU
		Jorong Kapalo Koto, Jorong Kabun, Jorong Atas Laban, Jorong Lambuk, Jorong Alang Laweh, Jorong Padang tengah dan Jorong Air Babar, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Halaban	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU
		koto tinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Koto Tinggi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	Cermin Tikung
		Maek, Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Maek	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	RPPJ
		Nagari Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	PJU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan dan sasaran, prioritas serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dipergunakan sebagai pedoman pembangunan nasional di bidang perhubungan. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat agenda pembangunan nasional dalam naskah teknokratik antara lain “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, Program prioritas yang harus dicapai adalah Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan kegiatan prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Oleh karena itu maka disinkronkan dalam perencanaan-perencanaan yang diarahkan agar menjadi skala prioritas.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada pencapaian visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan visi :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Keterkaitan misi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Misi 4 yaitu **“Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”** dan Misi 5 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.**

Maka, berdasarkan misi Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Perhubungan adalah sesuai penjabaran Visi dan Misi dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Jalan
- b. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021 dan indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan indikator :
 - ✓ Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
 - ✓ Indeks Kelancaran Lalu Lintas
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan indikator Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ringkasan Tujuan dan Sasaran disajikan dalam Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas Jalan		1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020.

Renja Dinas Perhubungan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 2 (dua) program, 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 Sub Kegiatan
 - b. Administrasi Keuangan, dengan 3 Sub Kegiatan
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 Sub Kegiatan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 Sub Kegiatan
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 Sub Kegiatan
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 Sub Kegiatan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 Sub Kegiatan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan program dan kegiatan urusan di bidang perhubungan. Pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat 12 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan 3 Sub Kegiatan

- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan 3 Sub Kegiatan
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan 2 Sub Kegiatan
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan 2 Sub Kegiatan
- h. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan 7 Sub Kegiatan
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota, dengan 3 Sub Kegiatan
- f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan 3 Sub Kegiatan
- i. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, dengan 3 Sub Kegiatan
- g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan
- h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu) , dengan 2 Sub Kegiatan
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan 1 Sub Kegiatan
- j. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan 1 Sub Kegiatan

Berikut disajikan tabel Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	7	24
2	Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan (LLAJ)	1	12	31
TOTAL		2	19	55

Tabel III. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD.

Adapun mengenai uraian program dan kegiatan Dinas Perhubungan, target kinerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 :

Tabel IV. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				21.809.451.336				39.124.746.159
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	14.147.795.736			100 %	16.497.576.159
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85%	133.962.900				155.787.500
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	62.896.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	66.550.000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	50.324.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	55.357.500
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua	4 Laporan	20.742.000	Dana Transfer Umum-		4 Laporan	33.880.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Alokasi Umum			
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan		100%	3.791.024.367				4.994.406.308
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 Orang/bul	3.775.329.367	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 Orang/bulan	4.856.628.448
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	10.578.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	113.577.860
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5.117.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	24.200.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	480.000.000				644.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Orang	480.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Orang	644.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100%	556.358.000				496.127.709
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Jenis 1 Paket	10.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Jenis 1 Paket	4.114.000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket 17 Jenis	25.079.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket 17 Jenis	12.100.000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Jenis 4 Paket	100.952.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41 Jenis 4 Paket	110.587.950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80200 Lemba 12 Paket 6 Jenis	70.376.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80200 Lemba 12 Paket 6 Jenis	76.715.210
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 Eksemp 12 Dokumen	6.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1100 Eksemp 12 Dokumen	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang dilayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan 600 Porsi	50.372.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan 600 Porsi	99.825.000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	291.997.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	185.430.080

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		100 %	480.800.000			100 %	397.500.000
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	300.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	40.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit	194.500.000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Unit	139.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit	203.000.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	7.746.849.000			100 %	8.431.267.900
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan 500 Lembar	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan 500 Lembar	6.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan 3630000 KW	7.260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan 3630000 KW	7.986.000.000
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan 3 Jenis	17.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan 3 Jenis	22.784.300
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan 18 Orang	459.299.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan 18 Orang	416.433.600
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100%	958.801.469				840.932.500
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	437.373.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	245.932.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	264.543.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	495.000.000
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	256.885.469	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	100.000.000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas, Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan		0,53 Indeks 2,97 Rasio	7.661.655.600			0,53 Indeks 2,97 Rasio	22.627.170.000
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100 %	391.568.000			100 %	0
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	202.043.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	91.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	97.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik		65%	1.986.519.500				14.102.666.516
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Unit	459.701.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Unit	11.559.026.516
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	93.001.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40.000.000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Unit	1.433.816.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Unit	2.503.640.000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal		100 %	409.175.000			100 %	1.760.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	450.000.000
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan (unit)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit 0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	512.500.000
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	298.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	698.000.000
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	110.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	100.000.000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100%	349.955.500				78.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	238.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	43.500.000
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	111.705.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	35.000.000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)		94%	580.009.500				910.080.000
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	142.366.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	243.480.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Unit	39.493.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Unit	0
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6000 Dokume	113.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6000 Dokume	283.200.000
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	159.844.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	184.000.000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	41.017.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	54.400.000
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	44.355.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	80.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	23.000.000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	39.872.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	42.000.000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota		100%	3.072.924.000				4.534.691.484
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.828.956.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.965.448.284
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	185.916.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	278.214.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	58.052.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	291.029.200
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		100%	232.895.500				285.073.000
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	52.782.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	61.450.000
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	94.579.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	114.438.000
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	85.534.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	109.185.000
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana		100%	366.375.000				581.808.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	67.846.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	80.000.000
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	138.900.000
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	175.000.000
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	81.309.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	82.500.000
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	217.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	105.408.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		100%	29.099.000				30.000.000
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	29.099.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	30.000.000
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)		100%	91.886.200				94.656.000
2	15	02	2.10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.418.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	45.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	56.467.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	49.656.000
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	131.728.400				0
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	131.728.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota		100%	0				78.195.000
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	78.195.000
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		100%	19.520.000				171.000.000
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	19.520.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	21.000.000
TOTAL									21.809.451.336				39.124.746.159

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dan OPD pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 2 Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Meningkatkan Kualitas Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	3,13	2,97	2,82	2,68	2,55	2,42
			1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	3,13	2,97	2,82	2,68	2,55	2,42
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,56	79,57	79,58	79,59	79,60	79,61
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	86	87	88
			Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100

Tujuan Dinas perhubungan yaitu Meningkatkan Kualitas Jalan dengan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 3 Rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Tahun 2023
1	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,58	0,5	0,52
2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	3,29	2,42	2,82
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,38	79,61	79,58
4	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	33%	5%	2%
5	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	59%	75%	65%
6	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	90	95	94
7	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi	60	68	62
8	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	95,4	98,2	97,8
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	88	85
10	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.273.510	4.500.000	4.300.000
11	Rasio ijin trayek	2,92	2,98	2,95
12	Jumlah uji KIR angkutan umum	5847	6313	6069
13	Jumlah Pelabuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang	3	4	4
14	Persentase layanan angkutan darat	1,92%	2,60%	2,00%
15	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	85%	95%	91%
16	Pemasangan Rambu-rambu	59%	65%	61%
17	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0155	0,0155	0,0155
18	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3.273.510	4.500.000	4.300.000
19	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	120.000	150.000	135.000
20	Rasio Konektivitas Kota	44	50	47
21	V/C Ratio di jalan Kota	0,58	0,5	0,52

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								21,809,451,336				39,124,746,159	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,147,795,736				16,497,576,159	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								133,962,900				328,575,500	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	62,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	66,550,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	42,350,000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	34,848,000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	71,390,000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24,200,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	50,324,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55,357,500
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	20,742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	33,880,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,791,024,367				5,040,068,078	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 Orang/bulan	100 %	3,775,329,367	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,856,628,448
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	10,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	113,577,860
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24,200,000
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,990,000
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase tertib administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,671,770
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								0	218,163,000				
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	42,688,800
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	53,845,000
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	35,937,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	85,692,200
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							0				98,691,472		
2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	23,119,470
2	15	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,890,383
2	15	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	937,145
2	15	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,237,951
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	71,506,523
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							480,000,000				646,250,000		
2	15	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,250,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang	100 %	480,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	644,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							556,358,000	496,127,709					
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Jenis 1 Paket	100 %	10,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,114,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 17 Jenis	100 %	25,079,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12,100,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Jenis 4 Paket	100 %	100,952,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	110,587,950
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80200 Lembar 12 Paket 6 Jenis	100 %	70,376,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	76,715,210
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bahan bacaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1100 Eksemplar 12 Dokumen	100 %	6,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,355,469
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang dilayani	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan 600 Porsi	100 %	50,372,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	99,825,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	291,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	185,430,080
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							480,800,000	397,500,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		100 %	1 Unit	100 %	300,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Unit	100 %	40,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	194,500,000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Unit	100 %	139,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	203,000,000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7,746,849,000	8,431,267,900				
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 500 Lembar	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,050,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan 3630000 KWH	100 %	7,260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,986,000,000
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan 3 Jenis	100 %	17,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,784,300
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan 18 Orang	100 %	459,299,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	416,433,600
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								958,801,469	840,932,500				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	437,373,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	245,932,500
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	264,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	495,000,000
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	256,885,469	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								7,661,655,600			22,627,170,000		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								391,568,000			0		
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	202,043,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	91,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	97,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								1,986,519,500			14,102,666,516		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	10 Unit	60 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	500 Unit	60 %	459,701,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	11,559,026,516
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Unit	60 %	93,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	40,000,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	500 Unit	60 %	1,433,816,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	2,503,640,000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								409,175,000	1,760,500,000				
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	450,000,000
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan (unit)	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Unit 0 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	512,500,000
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	2 Unit	100 %	298,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	698,000,000
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	10 Orang	100 %	110,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	100,000,000
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								349,955,500	78,500,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	10 Dokumen	100 %	238,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	43,500,000
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	5 Laporan	100 %	111,705,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	35,000,000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								580,009,500			910,080,000		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	2 Unit	93 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	6 Orang	93 %	142,366,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	243,480,000
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	80 Unit	93 %	39,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	6000 Dokumen	93 %	113,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	283,200,000
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	93 %	159,844,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	184,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	9 Unit	93 %	41,017,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	54,400,000
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	3 Laporan	93 %	44,355,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	80,000,000
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	3 Laporan	93 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	23,000,000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	93 %	39,872,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	42,000,000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								3,072,924,000	4,534,691,484				
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	2,828,956,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	3,965,448,284
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	50 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	12 Laporan	100 %	185,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	278,214,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	2 Laporan	100 %	58,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	291,029,200
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								232,895,500	285,073,000				
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	6 Orang	100 %	52,782,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	61,450,000
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	12 Laporan	100 %	94,579,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	114,438,000
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	12 Laporan	100 %	85,534,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	109,185,000
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								366,375,000	581,808,000				
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	2 Orang	100 %	67,846,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	80,000,000
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	4 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	138,900,000
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	4 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	175,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	4 Laporan	100 %	81,309,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	82,500,000
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	4 Laporan	100 %	217,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	105,408,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								29,099,000	30,000,000				
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	4 Unit	100 %	29,099,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	30,000,000
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								91,886,200	94,656,000				
2	15	02	2.10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	35,418,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	45,000,000
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	56,467,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	49,656,000
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								131,728,400	0				
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	131,728,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0			78,195,000		
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	78,195,000
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								19,520,000			171,000,000		
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	150,000,000
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	19,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0,53 Indeks 2,97 Rasio	21,000,000
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0				0	
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	0
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	1 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	0.53 Indeks 2,97 Rasio	0
TOTAL													21,809,451,336				39,124,746,159	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah Renja tahun ketiga dari Rencana Strategis 2021-2026, Renja merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Berkaitan dengan itu, menjamin terlaksananya program dan kegiatan Renja Tahun 2023 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah, sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.
2. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan RKA tahun 2023.
3. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
4. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulan dan semesteran
5. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dilaksanakan pada akhir tahun pelaksanaan Renja terhadap target indikator yang sudah ditetapkan.

Disamping kaidah yang dirumuskan, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan

kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perhubungan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perhubungan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.